

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kasus jilbab siswi nonmuslim di SMK Negeri 2 Padang menimbulkan polemik pada awal tahun 2021. Polemik ini menjadi sorotan dan menyita perhatian banyak kalangan. Tidak hanya menjadi sorotan di tingkat lokal Sumatera Barat, tetapi juga menuai respon banyak pihak pada skala nasional.

Kasus ini bermula dari postingan Ayah siswi bernama Jeni Cahyani Hia, yang mengunggah video siaran langsung di akun *facebook* bernama Elianu Hia pada tanggal 21 Januari 2021. Dalam video yang sempat viral tersebut, terjadi perdebatan dan adu argumen antara Elianu dengan pihak sekolah. Elianu mempertanyakan dasar aturan menggunakan kerudung dan merasa keberatan jika anaknya memakai pakaian tersebut karena non muslim.

Peristiwa ini menimbulkan pro dan kontra yang mengundang tanggapan dari berbagai tokoh, politisi dan pejabat lembaga Negara baik di daerah maupun di tingkat pusat. Tidak hanya itu, polemik ini bahkan sampai menyebabkan keluarnya Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI, yang dikenal dengan SKB Tiga Menteri, Nomor 02/KB/2021, 025-199 Tahun 2021 dan 219 Tahun 2021 tanggal 3 Februari 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. SKB ini mengatur Pemerintah Daerah dan Sekolah agar memberikan kebebasan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut, tanpa kekhasan agama tertentu serta tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu.

Secara garis besar, ada dua pandangan yang berkembang seputar kasus ini. *Pertama*, pihak yang menyatakan kasus ini sebagai bentuk dan upaya pemaksaan pemakaian jilbab bagi siswi non muslim, pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, tidak menghargai keberagaman, tidak pancasilais, bentuk intoleransi dan sebagai wujud anti-kebhinekaan. *Kedua*, pihak yang berpandangan bahwa kasus

ini adalah masalah miskomunikasi antara pihak guru dan wali murid, aturan berjilbab bagi siswi nonmuslim di SMKN 2 Padang hanya berupa imbauan dan sifatnya menyesuaikan bagi siswi nonmuslim (bukan pemaksaan), dan berkaitan dengan kultur, kebiasaan dan kearifan lokal di Sumatera Barat dimana agama dan tradisi sudah menyatu sesuai dengan filosofi “*adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah*”.

Meluasnya eskalasi kasus ini, tidak terlepas dari adanya peran media. Kasus ini seolah di besar-besarkan sehingga mengundang tanggapan tokoh, politisi, dan pejabat lembaga Negara di “Jakarta”. Penilaian yang diberikan cenderung merugikan dan mendiskreditkan Sumatera Barat karena seolah ditarik ke ranah yang lebih luas sehingga bukan hanya perkara di SMK saja, akan tetapi ditujukan ke Sumatera Barat secara umum, sehingga memberi kesan bahwa Sumatera Barat intoleran, anti-kebhinekaan dan tidak pancasilais. Permasalahan yang seharusnya menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, ditanggapi dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Jika dilihat ke belakang, peristiwa ini bukanlah kejadian pertama yang ditujukan kepada Sumatera Barat terkait isu serupa. Sebelumnya pada medio September 2020 tepatnya pada tanggal 2 September, dalam suasana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Puan Maharani menyinggung soal Pancasila dan Sumatera Barat saat mengumumkan calon Kepala Daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Pada acara tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) ini awalnya mengumumkan pasangan calon yang direkomendasikan oleh PDIP untuk maju pada Pemilihan Gubernur 2020 Sumatera Barat yaitu politikus Partai Demokrat Mulyadi dan mantan Bupati Kabupaten Padang Pariaman, Ali Mukhni. Setelah mengumumkan rekomendasi itu, dalam pidatonya Puan menyatakan “Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila”(Tempo.co, 5/09/2020). Kalimat bernada harapan ini akhirnya memicu polemik dan menimbulkan kontroversi. Buntut pernyataan tersebut Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Mulyadi-Ali Mukhni akhirnya mengembalikan dukungan dari PDIP serta Puan Maharani dilaporkan oleh Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang ke polisi karena

dianggap menghina masyarakat Sumatera Barat akibat ucapan dan pernyataan tersebut (Tempo.co, 5/09/2020).

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, sebelumnya sempat “curhat” dan menyinggung soal Sumatera Barat dalam pidatonya di acara itu. Ia mengaku bertanya-tanya soal penyebab PDIP sulit menang di Sumatera Barat dan sepertinya rakyat di Sumatera Barat belum menyukai PDI Perjuangan. Padahal jika melihat sejarah bangsa, banyak tokoh asal Sumatera Barat yang menjadi nasionalis. Ia mencontohkan Bung Hatta yang bersama ayahnya, Bung Karno, menjadi proklamator kemerdekaan Indonesia (Tempo.co, 5/09/2020).

Pernyataan Megawati tersebut mengindikasikan bahwa isu-isu seperti intoleran dan tidak pancasilais yang diarahkan ke Sumatera Barat ini tidak bisa dilepaskan dari faktor politis yaitu kekalahan, tidak pernah menang atau tidak mendapat tempatnya PDIP di hati masyarakat Sumatera Barat. Kemenangan PDIP di level nasional tidak berbanding lurus dengan hasil yang diperoleh di Sumatera Barat (Afriandi, 2021:134). Padahal sejak periode pertama Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan kader PDIP, Jokowi cukup sering bersafari dan berkunjung ke Sumatera Barat. Anggaran Pemerintah Pusat pun (APBN) cukup banyak dialokasikan ke Provinsi Sumatera Barat, melalui proyek pembangunan Tol Padang-Pekanbaru, kereta api Bandar Udara Minangkabau, dan revitalisasi seribu rumah gadang (Tagar.id, 24/04/2019). Selain itu ada beberapa proyek prioritas Jokowi di Sumatera Barat seperti jalan penghubung Solok Selatan dengan Tanah Datar, akses jalan ke wisata Mandeh, dan proyek jalan Trans Mentawai (Detik.com, 16/10/2018). Jokowi juga melakukan pendekatan kepada rakyat Sumatera Barat dengan cara lain seperti Shalat Idul Fitri di Masjid Raya Sumatera Barat pada tahun 2016 (Kompas.com, 06/07/2016). Ibu Negara Iriana juga menarik perhatian dengan mengenakan pakaian khas Minangkabau pada peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2017 dan 2018 (Liputan6.com, 17/07/2018). Namun semua upaya tersebut tidak menarik mayoritas masyarakat Sumatera Barat mendukung dan memilih PDIP serta Jokowi (Afriandi, 2021:135).

Peristiwa dan isu-su seperti ini, menjadi santapan empuk untuk ‘digoreng’ dan dibesar-besarkan oleh media demi menarik keuntungan secara finansial, sehingga pada tahap tertentu, isu-isu seperti ini merugikan dan dapat

mendiskreditkan Sumatera Barat. Sebagaimana yang dikatakan U Thant bahwa pers selalu *overemphasized*, melebih-lebihkan dan beritanya selalu *overdramatized*, selalu mendramatisir dan terkadang didistorsikan agar laku dan menarik perhatian orang (Kusumaningrat, 2014:67).

Media dalam pandangan kaum konstruksionis bukanlah saluran yang bebas dan berita merupakan hasil konstruksi dari realitas. Berita yang hadir di hadapan khalayak merupakan hasil kemas dan pemingkaian oleh media. Inilah yang dinamakan dengan *framing*. Analisis *framing* berangkat dari pemikiran bahwa berita merupakan hasil konstruksi realitas yang dilakukan oleh wartawan dan/atau redaksi media (Sobur, 2018:162). Karena merupakan hasil konstruksi, maka berita yang hadir belum tentu 100 persen sama dengan realitas yang ada.

Analisis *framing* dalam perspektif komunikasi dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta (Sobur, 2018:162). Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya (Sobur, 2018:162). Dengan kata lain, *framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita (Sobur, 2018:162). Cara pandang atau perspektif tersebut akhirnya menentukan fakta apa yang akan diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan serta hendak dibawa kemana berita tersebut (Eriyanto, 2012: 221).

Ruang pemberitaan (*newsroom*) tidak dipandang sebagai ruang hampa, netral dan seakan-akan hanya menyalurkan informasi yang didapat, tanpa dikurangi dan dilebihkan (Sudiby, 2001:7). Banyak faktor yang mempengaruhi proses pembentukan berita. Hal ini disebabkan karena banyak kepentingan dan pengaruh yang dapat mengintervensi media, sehingga akan terjadi pertarungan dalam memaknai realitas dalam presentasi media (Sudiby, 2001:7). Dalam hal ini media dimaknai sebagai arena pertarungan wacana. Apa yang disajikan media pada dasarnya adalah akumulasi dari pengaruh yang beragam (Sudiby, 2001:7).

Jurnalis yang bertugas di lapangan bukanlah 'pemain' tunggal media dalam mengkonstruksi berita. Pemingkaian berita juga dikontrol oleh organisasi media. Berbagai kebijakan redaksi akan mendorong penyeleksian isu mana yang

akan disuguhkan kepada khalayak. Penyajian isi media kepada khalayak dipengaruhi oleh level intra media dan ekstra media. Proses pembingkai dalam instansi media melibatkan faktor individu pekerja media, media rutin dan organisasi media. Sementara pada level ekstra media, ada pengaruh yang terdapat dari sumber berita, sumber penghasilan media, pangsa pasar dan tentunya pemerintah, dimana semuanya itu berpedoman kepada nilai serta ideologi yang dianut oleh media tersebut.

Pemberitaan tentang polemik pemakaian jilbab bagi siswi nonmuslim di SMKN 2 Padang, menarik bagi peneliti untuk dikaji dan dianalisis secara *framing*. Alasannya karena peneliti ingin melihat bagaimana media mengemas, membingkai atau mem-*framing* peristiwa tersebut. Adapun yang diteliti dalam hal ini bukanlah mengenai kasus yang berbau SARA-nya, akan tetapi bagaimana media mengemas berita peristiwa dimaksud, dalam arti bagaimana perspektif media dalam menyajikan peristiwa yang terjadi di SMK Negeri 2 Padang ini kepada khalayak.

Berita mengenai konflik terutama yang berbau dengan SARA, menjadi isu yang 'seksi' bagi para wartawan dan media untuk diliput dan diberitakan. Karena isunya berbau kontroversial dan merupakan peristiwa yang tidak biasa. Secara nilai berita, mempunyai nilai berita yang cukup tinggi dan menarik bagi khalayak untuk diikuti. Oleh karena itu, pers maupun media berkewajiban untuk menyeleksi setiap kejadian dan konflik. Karena fakta-fakta menunjukkan bahwa isu agama merupakan isu sensitif yang dapat memicu konflik bahkan perpecahan bangsa (Moenawar, 2017: 103).

Pentingnya penelitian dilakukan ini karena kasus yang diangkat tergolong unik dalam pandangan peneliti karena kewajiban pemakaian jilbab bagi siswi nonmuslim ini terjadi di sebuah sekolah tingkat SMK di Kota Padang, namun menuai sorotan luas secara nasional dan bahkan sampai mendapat respon dari Pemerintah Pusat melalui kebijakan berupa SKB Tiga Menteri. Padahal kasus intoleransi dan berbau keagamaan di sekolah bukanlah kasus yang baru, pertama kali terjadi. Dalam catatan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), sebelumnya pernah ada kasus pelarangan jilbab di SMAN 1 Maumere 2017 dan di SD Inpres 22 Wosi Manokwari tahun 2019 serta jauh sebelumnya pada tahun 2014 juga

sempat terjadi pada sekolah-sekolah di Bali (Jawapos.com, 25/01/2021). Namun tidak sampai mendapat respon dari Pemerintah Pusat melalui sebuah kebijakan.

Walaupun polemik ini akhirnya disudahi seiring dengan dibatalkannya kekuatan hukum SKB Tiga Menteri oleh Mahkamah Agung dengan mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil nomor perkara 17/P/HUM/2021 yang diajukan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat sebagai pemohon, yang diketok palu pada tanggal 3 Mei 2021, dan telah berlalu selang setahun yang lalu, namun secara akademis menyisakan ruang untuk dikaji. Permasalahan yang akan dikaji melalui analisis *framing* ini, termasuk ke dalam cakupan riset komunikasi yakni studi mengenai isi pesan media pada tingkatan atau konteks komunikasi massa. Artinya penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu komunikasi terutama dalam bidang kajian atau studi media tentang pemahaman pesan yang dikemas melalui analisis *framing*.

Secara teoretis jika dilihat dari kajian terdahulu, penelitian analisis *framing* untuk melihat pembingkai media terhadap sebuah isu memang telah banyak dilakukan. Beberapa diantaranya adalah penelitian oleh Devi Ambarsari dan Amalia Rosyadi Putri (2021), Aisyah Fadhilah dan Yuli Candrasari (2021), Rifa Yanas (2020), Retno Sari Handayani (2020), Uky Firmansyah (2019), Regia Fiorentina, Mayasari dan Fajar Hariyanto (2018) dan Silvina Mayasari (2017). Namun kebanyakan dari penelitian tersebut hanya menggunakan teori dan model *framing*, serta hanya menyingkap faktor ideologi dibalik *framing* media, seperti penelitian yang dilakukan oleh Regia Fiorentina, Mayasari dan Fajar Hariyanto (2018). Selain itu dalam menjelaskan isi media, kebanyakan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan ekonomi-politik (*political-economy approach*) sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Devi Ambarsari dan Amalia Rosyadi Putri (2021) dan pendekatan organisasi (*organizational approach*) sebagaimana penelitian Retno Sari Handayani (2020), yang menggunakan *framing* sebagai analisis institusional media. Sementara Rifa Yanas (2020), menggunakan penelitian *framing* untuk mengungkap keberpihakan media terhadap isu yang diteliti.

Penelitian ini selain menggunakan teori dan model *framing*, juga menggunakan Teori Hirarki Pengaruh Isi Media dalam menganalisis faktor yang mempengaruhi *framing* media dimana terdapat level individu, level rutinitas media, level organisasi media, level ekstra media, dan level ideologi, yang mempengaruhi isi media. Artinya, dalam menjelaskan isi media (studi media), penelitian ini lebih bersifat komperhensif karena menggunakan pendekatan kulturalis (*culturalist approach*) yang merupakan gabungan antara pendekatan ekonomi politik dan pendekatan organisasi (Sudiby, 2001: 4). Dalam pendekatan kulturalis, proses produksi media dilihat sebagai mekanisme yang melibatkan faktor internal media sekaligus juga faktor eksternal di luar diri media. Media pada dasarnya memang mempunyai mekanisme untuk menentukan pola dan aturan organisasi, tetapi berbagai pola yang dipakai untuk memaknai peristiwa tersebut tidak bisa dilepaskan dari kekuatan-kekuatan ekonomi politik di luar diri media (Sudiby, 2001:4).

Pendekatan kulturalis ini lebih memadai untuk menjelaskan perkembangan pers pasca Orde Baru. Secara empiris, perubahan signifikan pada corak pemberitaan pers Indonesia pasca Orde Baru secara umum dapat dilihat sebagai hasil dari tindakan-tindakan para pengelola media yang mencoba melepaskan diri dari batasan-batasan yang membelenggu kinerja mereka. Namun dinamika internal redaksi media tetap tidak bisa sepenuhnya menjadi identitas yang otonom, karena ada kekuatan-kekuatan ekonomi baru yang turut mempengaruhinya.

Uraian dan penjelasan diatas merupakan *state of the arts* yang mengidentifikasi *knowledge gaps* (kesenjangan-kesenjangan pengetahuan) serta sekaligus menjadi *novelty* (kebaruan) dan potensi *knoweldge contribution* penelitian ini. Hal ini yang membedakan dan menjadi kelebihan penelitian ini dari penelitian-penelitian yang sudah ada.

Adapun model analisis *framing* yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Robert N. Entman, yang terdiri dari 4 (empat) elemen perangkat *framing*, yaitu : *Define Problems* (pendefinisian masalah), *Diagnose Causes* (memperkirakan penyebab masalah), *Make Moral Judgement* (Membuat Pilihan Moral) dan *Treatment Recommendation* (menekankan penyelesaian).

Jenis media yang diteliti adalah media *online*. Dipilihnya media *online* karena berdasarkan riset AC Nielsen, sebuah perusahaan informasi dan pengukuran global, bahwa di Indonesia saat ini jumlah pembaca media *online* digital sudah lebih banyak dibandingkan media cetak. Sejak empat tahun terakhir, jumlah pembeli koran terus merosot karena masyarakat beranggapan bahwa informasi seharusnya bisa didapat secara gratis. Data survey Nielsen pada bulan Agustus tahun 2020 menunjukkan bahwa jumlah pembaca media *online* di Indonesia mencapai 6 juta orang, sedangkan pembaca media cetak yang hanya sebanyak 4,5 juta orang. Media cetak saat ini hanya menjadi pilihan kelima masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan penetrasi sebesar 8%. Urutan pertama ditempati televisi dengan 96%, diikuti papan iklan di jalanan 52%, penggunaan internet sebesar 43% dan radio sebanyak 37%. Masyarakat kebanyakan membaca koran di kantor, sekolah dan perpustakaan sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya. Sedangkan media *online* dapat diakses melalui *smartphone* kapan saja dimana saja dan tentunya dapat diperoleh secara gratis, yang merupakan suatu kemudahan dan daya tarik tersendiri bagi khalayak pembaca. Pemberitaan media *online* saat ini mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi pembentukan opini dan penafsiran atau pemaknaan berita dan informasi (Hakim, 2020:11).

Media *online* yang dipilih sebagai subjek penelitian adalah Detik.com dan Republika *Online* (Republika.co.id) yang disingkat *ROL*. Pengambilan Detik.com sebagai subjek penelitian karena menurut Similarweb.com, Detik.com termasuk situs berita terpopuler di Indonesia dan merupakan situs yang menduduki ranking 3 (tiga) di jajaran situs media *online* paling banyak dikunjungi pembaca di Indonesia dalam kurun waktu enam bulan terakhir Januari sampai Juli 2021 dengan total pengunjung sebanyak 179,8 juta pengunjung. Disamping itu, situs ini juga meraih waktu membaca yang lebih tinggi dibandingkan situs pemberitaan lainnya, dengan rata-rata pengunjung membaca 4 hingga 5 artikel di situs ini dengan waktu baca masing-masing selama 6 menit 58 detik. Selain itu berita yang berkaitan dengan jilbab di SMK Negeri 2 itu selalu masuk dalam *trending* dan termasuk berita dalam kategori *most comment* dan *most popular* di kanal Detik.com. Ini berarti berita tentang polemik ini, posisinya selalu pada posisi



pertama atau kedua. Berita yang masuk ke dalam kategori *most comment* dan *most popular* juga menandakan bahwa pembacanya sudah mencapai angka jutaan orang. Berita itu akan selalu muncul dan akan selalu dicari, dikomentari, dibaca dan dibagikan orang serta *viewernya* sudah sangat tinggi.

Sementara *Republika Online* dipilih sebagai subjek penelitian karena sejak awal persoalan ini viral, *Republika Online* begitu intens menyajikan berita tentang kasus ini. Sebagai media yang berbasis komunitas Muslim, isu ini menjadi perhatian *Republika Online* dan adanya penyediaan ruang yang cukup terhadap pemberitaan kasus ini. Disamping itu, *Republika Online* juga terlihat menghindari diksi-diksi yang dapat memicu prasangka banyak pihak terkait isu intoleransi dan arah pemberitaannya yang berbeda dari pemberitaannya pada umumnya yang beredar di media massa terhadap kasus yang terjadi di SMKN 2 Padang ini.

Rentang waktu pemberitaan yang dipilih antara tanggal 21 Januari 2021 hingga 2 Februari 2021. Dengan kata lain, penelitian ini hendak menganalisis dinamika pemberitaan mengenai polemik pemakaian jilbab bagi siswa nonmuslim di SMK Negeri 2 Padang mulai dari momentum ketika Ayah siswi bernama Jeni Cahyani Hia, mengunggah video siaran langsung, hingga sebelum diterbitkannya SKB Tiga Menteri.

Berdasarkan uraian-uraian baik pada aspek alasan gap teoritik, gap penelitian terdahulu maupun pada aspek fenomena empiris tersebut diatas, maka muncul keinginan untuk melaksanakan penelitian dengan judul **“Isu Keagamaan dalam Pembingkaihan Media (Analisis *Framing Model* Robert N. Entman terhadap Berita Polemik Jilbab di SMK Negeri 2 Padang pada *Detik.com* dan *Republika Online*)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Uraian di atas adalah upaya untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang akan diteliti. Maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini :

1. Bagaimana pembingkaihan *Detik.com* dan *Republika Online* terhadap berita polemik jilbab bagi siswi non muslim di SMK Negeri 2 Padang ?
2. Bagaimana pembingkaihan yang dilakukan oleh *Detik.com* dan *Republika Online*, jika dikaitkan dengan 5 (lima) level pengaruh isi media yaitu level

individual, level rutinitas media, level organisasi, level ekstra media dan level ideologis, level mana yang paling paling mempengaruhi pemberitaan polemik jilbab di SMK Negeri 2 Padang tersebut?

### 1.3 Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pembingkaiian berita polemik pemakaian jilbab di SMK Negeri 2 Padang pada Detik.com dan Republika *Online*.
2. Untuk menganalisis level yang paling mempengaruhi pembingkaiian Detik.com dan Republika *Online* terhadap berita polemik jilbab di SMK Negeri 2 Padang, jika dikaitkan dengan 5 (lima) level pengaruh isi media yaitu level individual, level rutinitas media, level organisasi, level ekstra media dan level ideologis

### 1.4 Manfaat

#### 1.4.1 Manfaat Akademis

1. Penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan di bidang ilmu komunikasi, terutama tentang pemahaman pesan yang dikemas melalui analisis *framing*
2. Untuk menambah referensi ilmu komunikasi di bidang jurnalistik dan kajian/studi media.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang proses *framing* oleh media.
2. Bagi praktisi yang bergerak dalam bidang komunikasi massa, khususnya bagi wartawan, agar lebih mawas diri untuk mengantisipasi setiap resiko dan efek yang timbul sebagai akibat dari pemberitaan yang dilakukan.
3. Dapat memberikan masukan dan acuan bagi para akademisi maupun praktisi, umum, baik mahasiswa maupun praktisi jurnalistik, untuk dapat melihat, mengamati serta mengidentifikasi *frame* berita yang ada di media.
4. Sebagai literasi media bagi khalayak pembaca bahwa dalam sebuah peristiwa atau isu yang diberitakan terdapat unsur pembingkaiian sehingga khalayak pembaca bisa lebih kritis serta hati-hati dalam mengkonsumsi teks berita serta dapat menyaring berita yang diperoleh dari media.